

08

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate
Governance

Love Life
😊





**astra
life**

member of ASTRA





TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Astra Life berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan pada pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran, dan Kesetaraan.

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Astra Life is fully committed to implement good corporate governance designed for insurance companies in all of the Company's management aspects. This commitment is reflected in the implementation of a Good Corporate Governance (GCG) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Company, by upholding the GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, and Equality.



Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, Astra Life dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

By implementing GCG principles, Astra Life can improve its performance and optimize the Company's value to its stakeholders, particularly the policy holders, insured, and/or the beneficiaries through accountable manners performed in accordance with the applicable laws and regulations and ethical values.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan GCG, Astra Life telah membuat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

For the purpose of effective GCG implementation, Astra Life has established Good Corporate Governance Policy which is prepared based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Astra Life telah melakukan penilaian pada tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dua kali dalam setahun.

Refer to the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates, Astra Life regularly performs twice a year assessments on the integrated good corporate governance for financial conglomerates.

Dalam penerapannya, Perusahaan juga melakukan *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala terhadap kinerja Perusahaan, dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana hasil dari *self-assessment* tersebut adalah bahwa Perusahaan berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan.

In practice, the Company also conducts periodic Good Corporate Governance self-assessments of the Company's performance, with a comprehensive and structured assessment of the results of integrated risk and performance profiles which include good corporate governance, profitability, capital capacity, and/or funding. in accordance with applicable regulations. Where the result of the self-assessment is that the Company adheres to the principles of GCG in all aspects of managing the Company.

Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur utama dan pendukung yang lengkap serta pemenuhan yang sangat memadai oleh Perusahaan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

This is reflected by the fulfillment of main structure and supporting also the very adequate fulfillment by the Company to good corporate governance principle with regard to precautionary and risk management principle.

Perusahaan senantiasa memperhatikan penerapan secara komprehensif dan efektif dari praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis dan tatanan struktur Perusahaan secara terus menerus

The Company consistently give attention to the comprehensive and effective implementation of GCG practices in every decision making in all business lines and the Company's structure continuously to accommodate any changes that occurred, including



untuk mengakomodir setiap perubahan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik adalah untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Peningkatan kualitas aspek penerapan Tata Kelola terus dilakukan oleh Perusahaan dan jika terdapat ruang perbaikan dalam aspek tertentu, hal tersebut diselesaikan dalam tindakan normal oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama tahun 2022 Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2022 secara tatap muka. Hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah menyetujui Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021, menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021, pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah, menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 dan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2022, dan pendelegasian wewenang untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS Tahunan.

but not limited to changes in the prevailing laws and regulations and stick with the GCG principles.

The Company is completely aware that the implementation of Good Corporate Governance is to improve achievement of business results and optimizing the Company value for all the stakeholders especially policy holder, the insured, participants, and/or beneficiary, accountably and based on legislation also ethics value. Quality enhancement of the implementation of Good Corporate Governance aspect is done continuously by the Company and such improvement in any aspects have been done with regular action by the Company with regard to mitigation and risk management principle.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2022, the Company had conducted its Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on April 12th, 2022 face to face. The result of the Annual GMS is to approve the Annual Report for financial year of 2021, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Result Report as mentioned in Annual Report, and ratification of the Company Financial Statements for the Financial Year of 2021, appointment of the Board of Director Member, Board of Commissioners Member, and Sharia Supervisory Board, determination of the salary and allowances of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory for the Financial Year of 2022, and appointment of Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2022, and delegation of authority to perform follow-up on the results of the decisions adopted in the Annual GMS.



DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Dewan Komisaris Astra Life berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0007169 tanggal 21 April 2022.

Adapun susunan Anggota Dewan Komisaris Astra Life sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Menjabat Term of Office
1.	Suparno Djasmin	Presiden Komisaris President Commissioner	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18 th , 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
2.	Auddie Alexander Wiranata	Komisaris Commissioner	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18 th , 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2023 Until AGMS 2023
3.	Benny Redjo Setyono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18 th , 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
4.	Yulian Noor	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18 th , 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024

Susunan Dewan Komisaris tersebut tidak mengalami perubahan dari yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 033/BOD-ASLI/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 mengenai Pelaporan Perubahan Susunan Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris tersebut juga telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-510/NB.111/2021 tanggal 8 Februari 2021. Dalam susunan Dewan Komisaris, Perusahaan telah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham. Dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Komisaris telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners of Astra Life based on Notarial Deed No. 42 dated April 18th 2022 made by Notary Mala Mukti, SH, LL.M. The deed has been recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09-0007169 dated April 21st, 2022.

The composition of the Board of Commissioners of Astra Life is as follows:

The composition of the Board of Commissioners has not changed from its reported to the Financial Services Authority through letter No. 033/BOD-ASLI/II/2021 dated February 3rd, 2021 regarding Reporting of Board of Commissioner Changes. The composition of the Board of Commissioners has also been recorded in Financial Services Authority through its letter No. S-510/NB.111/2021 dated February 8th, 2021. In composition of the Board of Commissioners, the Company already has 2 (two) Independent Commissioners.

Each members of the Board of Commissioners of the Company does not have financial and family relationships with the other member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Board of Sharia Supervisory and/or the Shareholders. And in regards with the double positions held by the Board of Commissioners it has aligned with prevailing laws and regulations.



Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT ASURANSI JIWA ASTRA.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan melalui peninjauan kinerja operasional dan keuangan secara berkala, termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris memantau pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi beserta jajarannya, sebagaimana amanat oleh RUPS, dengan mengacu pada KPI Perusahaan serta memberikan saran dan masukan dalam Rapat Gabungan bersama dengan Direksi.

Selama tahun 2022, dengan dukungan komite-komite penunjang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Direksi, antara lain yaitu:

1. Strategi dan rencana bisnis untuk tahun 2023 serta menyetujui realisasi/pencapaian rencana bisnis tahun 2022;
2. Memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan realisasi rencana bisnis termasuk dalam hal produk, jalur distribusi, proses penjualan, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat dengan mengundang Direksi yang diselenggarakan bulanan untuk memastikan bahwa Direksi Perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Komisaris Independen Perusahaan telah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau

In performing their roles and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Company's Articles of Associations and the Charter of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners carries out the supervisory function of managing Company through periodic reviews of operational and financial performance, including important issues related to the economic, social, environmental, and legislative fields. The Board of Commissioners monitors Company's management carried out by the Board of Directors and their staff, as mandated by the GMS, with reference to the Company's Key Performance Indicator (KPI) and provides advice and input at the Joint Meeting with the Directors.

During 2022, with the support of the supporting committees of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has carried out their duties and responsibilities in matters of supervision and providing advice to the Board of Directors, including:

1. Business strategies and plans for 2023 and to approve the realization of the Company's business plan for the financial year 2022;
2. Give an inputs related to realization of business plan, including products, distribution channel, sales process, and compliance with the regulations;
3. To supervise periodically through monthly meeting by inviting Board of Directors to ensure that the Company's Board of Directors achieve the target;
4. To supervise the Board of Directors to maintain interest of all parties, especially the interest of policyholder, insured, participant, and beneficiary

Independent Commissioner of the Company has made the annual report regarding the execution of its duties in relation to the protection of the interest of policyholder, insured, participant, and/or beneficiary,



pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan yang merupakan bagian dari Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan

DIREKSI

Susunan Direksi Astra Life berdasarkan Akta No. 49 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0031471 tanggal 11 Juli 2022.

Adapun susunan Direksi Astra Life sebagai berikut:

both in respect of service and the settlement of the claim, including reports of ongoing disputes in mediation body, arbitration body, or judiciary which is part of the Company's Annual Periodic Report, especially in the Corporate Governance Report.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

During 2022, the Board of Commissioners has conducted 12 (twelve) meetings together with the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners has met the minimum attendance of the meeting as required by the prevailing laws and regulations.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of Astra Life based on Notarial Deed No. 49 on July 11th, 2022 made by Notary Mala Mukti, SH, LL.M. The deed has been recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09-0031471 dated July 11th, 2022.

The composition of the Board of Directors of Astra Life is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Menjabat Term of Office
1.	Windawati Tjahjadi	Presiden Direktur President Director	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
2.	Stephanie Arvianti Gunadi	Direktur Director	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
3.	Cornelius Nangoi	Direktur Director	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
4.	Christopher Pangestu ¹⁾	Direktur Director	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
5.	Hary Santoso ²⁾	Direktur Director	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024

Keterangan | Note:

- Segala fungsi, tugas, dan wewenangnya efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 27 Juni 2022.
All the function, duty, and authority will effective since the date of fit and proper test result from FSA, June 27th, 2022.
- Segala fungsi, tugas, dan wewenangnya efektif sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu tanggal 27 Juni 2022.
All the function, duty, and authority will effective since the date of fit and proper test result from FSA, June 27th, 2022.



Susunan Direksi tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 243/BOD-ASLI/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengenai Pelaporan Perubahan Susunan Direksi. Susunan Direksi tersebut juga telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-2607/NB.111/2022 tanggal 13 Juli 2022.

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi antara Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Direksi telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan, di mana kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Regulator di mana peran ini tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Direksi merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Direksi PT ASURANSI JIWA ASTRA.

RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2022, Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Direksi telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Astra Life berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0007169 tanggal 21 April 2022.

The composition of the Board of Directors has been reported to the Financial Services Authority through letter No. 243/BOD-ASLI/VII/2022 dated July 11th, 2022 regarding Reporting of the Board of Director Changes. The composition of the Board of Directors has also been recorded in Financial Services Authority through its letter No. S-2607/NB.111/2022 dated July 13th, 2022.

Each member of the Board of Directors of Astra Life has no affiliated with the other member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Principal Shareholders and/or Controllers and in regards with the double position held by the Board of Directors it has aligned with prevailing laws and regulations.

The Company has Director of Compliance, which this condition has been appropriate with the Regulatory provision which this role cannot be double with the member of Board of Directors who is in charge of insurance technical function, financial function, or marketing function.

In performing their roles and responsibilities, the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association and Code of Conduct of the Board of Directors PT ASURANSI JIWA ASTRA.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

During 2022, the Board of Directors has conducted 12 (twelve) internal meetings and each member of the Board of Directors has met the minimum attendance of the meeting as required by the prevailing laws and regulations.

BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

The composition of the Board of Sharia Supervisory of Astra Life based on Notarial Deed No. 42 on April 18th, 2022 made by Notary Mala Mukti, SH, LL.M. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09-0007169 dated April 21st, 2022.



Adapun susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Astra Life sebagai berikut:

The composition of the Board of Sharia Supervisory of Astra Life is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Menjabat Term of Office
1.	Sodikun	Ketua Chairman	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
2.	Rida Hesti Ratnasari	Anggota Member	Akta No. 42 tanggal 18 April 2022 Deed No. 42 dated April 18th, 2022	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024

Susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut tidak mengalami perubahan dari yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 128/BOD-ASLI/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 mengenai Pelaporan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut juga telah dicatat dalam administrasi Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-620/NB.233/2020 tanggal 5 Juni 2020.

The composition of the Board of Sharia Supervisory has not changed from its reported to the Financial Services Authority through letter No. 128/BOD-ASLI/V/2020 dated May 8th, 2020 regarding Reporting on Composition of the Board of Sharia Supervisory. The composition of the Board of Sharia Supervisory has also been recorded in administration of the Directorate of Sharia Non-Bank Financial Industry by the Financial Services Authority through its Letter No. S-620/NB.233/2020 dated June 5th, 2020.

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Each members of the Sharia Supervisory Board of the Company does not have financial and family relationships with the other member of the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Shareholders. And in regards with the double positions held by the Shariah Supervisory Board, it has aligned with prevailing laws and regulations.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT ASURANSI JIWA ASTRA.

In performing their roles and responsibilities, the Board of Sharia Supervisory refers to the Company's Articles of Association and Code of Conduct of the Board of Sharia Supervisory PT ASURANSI JIWA ASTRA.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali dan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF SHARIA SUPERVISORY MEETING

During 2022, the Board of Sharia Supervisory has conducted 6 (six) internal meetings and each member of the Board of Sharia Supervisory has met the minimum attendance of the meeting as required by the prevailing laws and regulations.



ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Astra Life telah membentuk Komite Audit yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit merupakan organ Pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terkait informasi keuangan dan sistem pengendalian internal Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Komposisi Komite Audit Perusahaan terdiri 4 (empat) orang dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 12 April 2022, komposisi Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat Term of Office
1.	Benny Redjo Setyono	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
2.	Yulian Noor	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
3.	Hardi Montana	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
4.	Manaek Robert L. Toruan	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Member of Audit Committee (Independent Party)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan tersebut menjalankan peran secara profesional dan independen. Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE

Subject to Regulation of the Financial Services Authority No. 73/POJK.05/2016 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.05/2019 on Establishment, Membership Structure, and Working Period of the Committee on the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company, and Sharia Reinsurance Company, Astra Life has established an Audit Committee to assist and responsible to the Board of Commissioners. Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners which oversees the Company's financial information and internal control system based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

The composition of the Company's Audit Committee consist of 4 (four) members with the terms of office until the Company's Annual GMS 2022. Based on Circular Resolution of the Board of Commissioners dated April 12th, 2022 the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCY

All members of the Company's Audit Committee carry out their roles professionally and independently. The Audit Committee has fulfilled the following independence criteria:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik/atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>nonassurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali; 3. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan; 4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan 5. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Not a person in a public accounting firm, legal consulting office, public appraisal service office/ or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months; 2. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the past 6 (six) months, except for reappointment; 3. Doesn't have shares, either directly or indirectly in the Company; 4. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and 5. Has no business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities. |
|--|---|

RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2022, Komite Audit melaksanakan rapat komite sebanyak 14 (empat belas) kali dan 2 (dua) kali pada rapat tersebut mengundang Auditor Eksternal (*PricewaterhouseCoopers/PwC*).

LAPORAN KOMITE AUDIT

Laporan Komite Audit merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan tercantum dalam Laporan Berkala tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan. Selama tahun 2022, Komite Audit telah menetapkan dan menjalankan program kerja sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE MEETING

During 2022, the Audit Committee conducted 14 (fourteen) committee meetings and 2 (two) of the meeting was inviting the External Auditor (*PricewaterhouseCoopers/PwC*).

AUDIT COMMITTEE REPORT

Audit Committee Report is a part of the Board of Commissioners Supervisory Report and stated in the Company's Annual Report, especially in the Corporate Governance Report.

The Audit Committee submit the Audit Committee Report to the Board of Commissioners quarterly on every task implementation with its recommendation. During 2022, the Audit Committee has established and implemented work programs as follows:



No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	<p>Memberikan persetujuan atas Rencana Audit tahunan 2022 dan perubahannya serta memantau pelaksanaan Rencana Audit tahun 2022 dan perubahannya.</p> <p>Giving the approval for the 2022 annual Audit Plan and its changes as well as to monitor the implementation of the 2022 Audit Plan and its changes.</p>	<p>Telah dilakukan persetujuan atas Rencana Audit Tahunan untuk tahun 2022 pada Desember 2021 dan perubahannya pada Maret 2022.</p> <p>Approval of the Annual Audit Plan for 2021 was made in December 2021 and its changes in March 2022.</p> <p>Telah dilakukan pemantauan terhadap pemenuhan Rencana Audit Tahun 2022 dan perubahannya secara bulanan yang mencakup pelaksanaan audit, hasil audit, rekomendasi audit kepada Manajemen, dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi audit oleh departemen/unit kerja terkait.</p> <p>Monthly monitoring of the fulfillment of the 2022 Audit Plan and its changes has been carried out which includes the implementation of the audit, audit results, audit recommendations to Management, and fulfillment of follow-up audit recommendations by the relevant departments /work units.</p>
2.	<p>Melakukan penelaahan atas kinerja keuangan Perusahaan</p> <p>Reviewing the Company's financial performance</p>	<p>Telah dilakukan penelaahan kinerja keuangan Perusahaan secara bulanan yang mencakup <i>annual premium earned (APE)</i>, <i>value of new business (VNB)</i>, <i>gross written premium (GWP)</i>, <i>net written premium (NWP)</i>, laba/rugi dan neraca Perusahaan, tingkat solvabilitas (<i>risk based capital/RBC</i>) serta kinerja investasi baik investasi Perusahaan (<i>non-linked</i>) maupun atas unit-linked funds terhadap rencana bisnis Perusahaan.</p> <p>Reviewed the Company's financial performance on a monthly basis that includes annual premium earned (APE), value of new business (VNB), gross written premium (GWP), net written premium (NWP), profit / loss and balance sheet, the level of solvency (risk based capital/RBC) as well as investment performance of both Company investments (non-linked) and unit-linked funds towards the Company's business plan.</p>
3.	<p>Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)</p> <p>Reviewing the financial statements audited by the Public Accounting Firm (KAP)</p>	<p>Telah menerima dan menelaah hasil audit laporan keuangan per 31 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC), sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.</p> <p>Received and reviewed the results of audits of financial statements as of December 31st, 2021 conducted by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (members of PwC), in accordance with accounting standards in force in Indonesia and statutory provisions in the field of legislation insurance.</p>
4.	<p>Me-review penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon auditor eksternal</p> <p>Reviewing the appointment of an external auditor and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of prospective external auditors</p>	<p>Telah me-review penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC) dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan KAP dimaksud untuk laporan keuangan per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC) tahun laporan keuangan sebelumnya.</p> <p>Has reviewed the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PwC) and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the intended KAP for financial statements as of December 31st, 2022 based on the evaluation results of the performance of the Public Accountant Office (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PwC) of the previous financial year.</p>



No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
5.	<p>Mengevaluasi piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Evaluating the Audit Committee charter periodically adjusted to the development of statutory provisions</p>	<p>Telah dilakukan pembahasan atas Surat Edaran OJK no. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan Dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang ditetapkan tanggal 22 Juli 2019 sebagai dasar penyesuaian/pengkinian Piagam Komite Audit yang saat ini berlaku.</p> <p>Discussion on OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 regarding the Formation, Membership Structure and Working Period of the Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies that were established on July 22nd, 2019 as a basis for adjustment / updating of the Audit Committee Charter</p>

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, meliputi penilaian efektivitas manajemen risiko, evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko, evaluasi piagam Komite secara berkala, identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Company establishes Risk Oversight Committee in accordance with Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.05/2014 on Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, Regulations of the Financial Services Authority No. 17/POJK.03/2014 on Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.05/2019 on Establishment, Membership Structure, and Working Period of the Committee on the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company, and Sharia Reinsurance Company.

In fulfilling their duties and responsibilities, Risk Oversight Committee has been equipped with working guidelines set forth in Risk Oversight Committee Charter, composed in accordance with applicable laws and regulations and regularly reviewed.

Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility of assisting Board of Commissioners, in monitoring the implementation of risk management prepared by the Board of Directors as well as assessing risk tolerance which can be accepted by the Company, including assessment of risk management effectiveness, periodic evaluation of risk management implementation, periodic evaluation of Committee's charter, identifying



perhatian Dewan Komisaris Perusahaan dan penugasan lain dari Dewan Komisaris Perusahaan sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite.

KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan terdiri dari 4 (empat) orang, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 12 April 2022, komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat Term of Office
1.	Yulian Noor	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Oversight Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
2.	Benny Redjo Setyono	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Oversight Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
3.	Hardi Montana	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Oversight Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024
4.	Manaek Robert L. Toruan	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Oversight Committee	s.d. RUPS Tahunan tahun 2024 Until AGMS 2024

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bertindak mandiri (independen). Independensi Komite Pemantau Risiko diatur menurut ketentuan, yakni sebagai berikut:

1. Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
2. Tidak mempunyai saham di Perusahaan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali Perusahaan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan; dan
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

other matters which, according to the Committee, requires Board's attention and other assignments from the Company's Board of Commissioners as long as these assignments have been stipulated in the Committee's charter.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE COMPOSITION

The composition of the Company Risk Oversight Committee consists of 4 (four) members with the terms of office until the Company's Annual GMS 2024. Based on Circular Resolution of the Board of Commissioners dated April 12th , 2022, the composition of the Company's Risk Oversight Committee is as follows:

RISK OVERSIGHT COMMITTEE INDEPENDENCY

In carrying out its duties to assist the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee acts independently. The independence of the Risk Monitoring Committee is regulated according to the provisions, which are as follows:

1. Not a key employee of the Company in the past 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
2. Do not have shares in the Company concerned, either directly or indirectly;
3. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Controlling Shareholders of the Company;
4. Do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest on the Company; and
5. Not serving as an official of a political party and/or serving as a legislative member and/ or regional head/deputy regional head.



Komite harus bertindak secara independen, mandiri dan profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Laporan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan tercantum dalam Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Komite Pemantau Risiko menyampaikan Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

The committee must act independently, professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party in carrying out its duties and responsibilities.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEETING

During 2022, the Risk Oversight Committee has conducted 12 (twelve) committee meetings .

RISK OVERSIGHT COMMITTEE REPORT

Risk Oversight Committee Report as a part of the Board of Commissioners Supervisory Report and stated in the Company's Annual Report, especially in the Corporate Governance Report.

The Risk Oversight Committee submits the Risk Oversight Committee Report to the Board of Commissioners quarterly on every task implementation with its recommendation.

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	<p>Mengkaji dan memantau 9 (sembilan) jenis risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko asuransi, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi), termasuk mengevaluasi laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) profil risiko konglomerasi terintegrasi dan laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) profil risiko Perusahaan (termasuk unit Syariah) sesuai ketentuan OJK.</p> <p>Reviewing and monitoring 9 (nine) type of risk (strategic risk, operational risk, liquidity risk, market risk, credit risk, insurance risk, compliance risk, legal risk, and reputational risk), including to evaluate integrated conglomerate risk profile self assessment report and Company's risk profile self assessment report in accordance with OJK regulation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penelaahan dan pemantauan atas 9 (sembilan) risiko setiap bulannya. • Reviewing and monitoring to 9 (nine) type of risk has been done monthly. • Telah dilakukan evaluasi atas laporan penilaian sendiri profil risiko konglomerasi terintegrasi 2 (dua) kali dan atas laporan penilaian sendiri profil risiko Perusahaan setahun sekali. • Evaluating the integrated conglomeration risk profile self assessment has been done twice and for the Company's risk profile self assessment report once in a year.
2.	<p>Mengkaji laporan evaluasi kinerja penggunaan alih daya (vendor) oleh Perusahaan minimal setahun sekali.</p> <p>Reviewing vendor utilization performance evaluation report by Company minimum once in a year.</p>	<p>Telah dilakukan pengkajian atas laporan hasil evaluasi kinerja vendor satu kali yaitu pada awal tahun.</p> <p>Reviewing the vendor utilization performance evaluation has been done once on the beginning of the year.</p>



No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
3.	<p>Memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh regulator yang berdampak terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.</p> <p>Monitoring the fulfillment of regulation as well as other related provision issued by regulator that impact to Company's business and operational.</p>	<p>Telah dilakukan pemantauan atas dampak dan pemenuhan setiap regulasi baru yang dikeluarkan regulator.</p> <p>Monitoring the impact and fulfillment of every new regulation which has been issued by regulator has been done.</p>
4.	<p>Memantau penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>Monitoring the implementation of Good Corporate Governance.</p>	<p>Telah dilakukan pemantauan atas aspek financial crime seperti APU/PPT, PEP, anti penyuapan dan korupsi serta fraud.</p> <p>Monitoring of financial crime aspect such as AML/CTF, PEP, anti-bribery and corruption also fraud.</p>
5.	<p>Memantau tingkat kepatuhan solvabilitas sesuai ketentuan regulator dan tingkat profitabilitas.</p> <p>Monitoring solvency compliance level in accordance with regulator provisions and provitability level.</p>	<p>Telah dilakukan pemantauan dan penelaahan setiap bulannya atas tingkat solvabilitas, pencapaian APE, VnB, VnBM, <i>persistence rate</i>, dan rasio klaim.</p> <p>Monthly monitoring and reviewing for solvency level, APE achievement, VnB, VnBM, persistence rate, and claim ratio has been done.</p>
6.	<p>Mengevaluasi kebijakan penerapan manajemen risiko.</p> <p>Evaluate the implementation risk management policy.</p>	<p>Telah dilakukan evaluasi dan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko.</p> <p>Evaluation and approval for risk management policy has been done.</p>
7.	<p>Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko oleh Direksi, termasuk atas isu/risiko signifikan yang teridentifikasi termasuk mitigasinya.</p> <p>Monitoring and evaluating the implementation of risk management from the Board of Director, including issue/significant risk that has been identified and its mitigation.</p>	<p>Telah dilakukan pemantauan & evaluasi atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pandemi covid-19. • Pemenuhan tindak lanjut atas hasil temuan terkait sertifikasi ISO 27001 untuk aplikasi IloveLife dan Buddies. • Pemenuhan tindak lanjut temuan audit OJK baik untuk konvensional maupun Syariah. • <i>Top risk</i>, termasuk mitigasi yang dilaksanakan • Laporan pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko. • <i>Parameter/sub indikator/threshold</i> penilaian risiko <p>Monitoring & evaluating has been done to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The handling of covid-19 pandemic • Fulfillment of follow up on findings related to ISO 27001 certification for IloveLife and Buddies application. • Fulfillment of follow up to OJK audit for both conventional and sharia. • Top risk, including the mitigation that has been done. • The Board of Director's accountability report on the implementation of risk management. • Parameter/sub-indicator/risk management threshold.



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komite Pengembangan Produk merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan produk asuransi untuk mendukung target Perusahaan. Komite Pengembangan Produk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Pengembangan Produk Perusahaan.

Mengacu pada Piagam Pengembangan Produk, rapat Komite Pengembangan Produk diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2022, Komite Pengembangan Produk telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

KOMITE INVESTASI (KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO))

Komite Investasi merupakan komite yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam memelihara struktur neraca Perusahaan (termasuk unit Syariah), meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan dan mengawasi manajemen risiko keuangan (kredit, pasar, likuiditas, dan asuransi), termasuk merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaannya.

Mengacu pada Piagam Komite Investasi, rapat Komite Investasi diadakan secara kuartalan (empat kali dalam setahun) atau lebih jika dibutuhkan sesuai diskresi Ketua Komite, untuk mengatasi masalah penting dan mendesak (urgent) yang terjadi. Selama tahun 2022, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang membantu Direksi yang berfungsi untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal penyusunan kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko dan penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

The Product Development Committee is a committee that assists the Board of Directors in providing policy directives related to the development of insurance products to support the Company's target. The Product Development Committee carries out its duties and responsibilities under the Product Development Charter.

Referring to the Product Development Charter, the Product Development Committee meeting is held at least 2 (two) times a year or at any time as needed. During 2022, the Product Development Committee held meetings twice a year.

INVESTMENT COMMITTEE (ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO))

Investment Committee is a committee that functions to assist Board of Directors in fulfilling their duties and responsibilities effectively to maintain Company's balance sheet (including sharia unit), covering analysis and formulation of policies and strategies, decision making and monitoring of financial risk management (credit, market, liquidity, and insurance risk), including establishing investment policy and monitoring its implementation.

Referring to Investment Committee Charter, Investment Committee meetings are conducted quarterly (four times a year) or at any time if required. During 2022, Investment Committee held 4 (four) meetings in a year.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee is a committee which assists Board of Directors to support implementation of effective risk management and provide recommendations to Board of Directors in constructing strategic policies and guidelines for risk management implementation, improvement or adjustment of risk management implementation and determination of matters related to business decisions which deviate from normal procedures.



Mengacu pada Piagam Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Manajemen Risiko diadakan secara kuartalan (empat kali dalam setahun) atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

KOMITE TINJAUAN MANAJEMEN

Komite Tinjauan Manajemen merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan tinjauan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) organisasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas terhadap ISO 27001:2013 berdasarkan Piagam Komite Tinjauan Manajemen.

Mengacu pada Piagam Komite Tinjauan Manajemen, rapat Komite Tinjauan Manajemen diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Selama tahun 2022, Komite Tinjauan Manajemen telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

KOMITE ETIK

Komite Etik merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka pembentukan, penerapan, dan pengawasan atas nilai-nilai dan perilaku etis yang berlaku di Perusahaan. Komite Etik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kebijakan Perusahaan dan Perangkat Perusahaan untuk mendukung penerapan perilaku etis telah memadai dan efektif, termasuk membantu mempromosikan pentingnya perilaku etis dan budaya kepatuhan atas Kode Etik kepada karyawan serta pihak lain yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Sesuai Piagam Komite Etik, rapat Komite Etik dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan lebih sering jika dibutuhkan. Selama tahun 2022, Komite Etik telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

KOMITE PERLINDUNGAN KONSUMEN

Komite Perlindungan Konsumen merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Fungsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan serta Fungsi Penanganan Pengaduan Nasabah.

Referring to Risk Management Committee Charter, Risk Management Committee meetings are held quarterly (four times a year) or at any time if required. During 2022, Risk Management Committee held 4 (four) meetings in a year.

MANAGEMENT REVIEW COMMITTEE

Management Review Committee is a committee which assists Board of Directors in providing review of Information Security Management System (ISMS/SMKI) implementation of the organization periodically to ensure appropriateness, adequacy, and effectiveness of ISO 27001:2013 under Management Review Committee Charter.

Referring to Management Review Committee Charter, Management Review Committee meetings are held at least 2 (two) times a year or at any time if required. During 2022, Management Review Committee held 2 (two) meetings in a year.

ETHICS COMMITTEE

Ethics Committee is a committee formed to assist Board of Directors in forming, implementing, and monitoring ethical values and behavior applied in the Company. Ethics Committee is responsible for ensuring Company's policies and tools which support ethical behavior implementation are adequate and effective, including promoting the importance of ethical behavior and a culture of compliance of Code of Ethics to employees and other parties related to Company.

Referring to Ethics Committee Charter, Ethics Committee meetings are held at least 2 (two) times a year or more if required. During 2022, Ethics Committee held 4 (four) meetings in a year.

CONSUMER PROTECTION COMMITTEE

Consumer Protection Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in carrying out the oversight function of the implementation of consumer and community protection within the Company, including but not limited to the implementation of the Financial Literacy and Financial Inclusion Functions as well as the Customer Complaint Handling Function.



Mengacu pada Piagam Komite Perlindungan Konsumen, rapat Komite Perlindungan Konsumen diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

KOMITE KLAIM

Komite Klaim merupakan komite yang dibentuk guna meminta persetujuan Direksi atas pembentukan Komite Klaim dan revisi matriks persetujuan atas ex-gratia sebagaimana diatur di dalam kebijakan terkait biaya.

Mengacu pada dokumen Memo Internal Komite Klaim, rapat Komite Klaim diadakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun (per kuartal) atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2022, Komite Klaim telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali dalam setahun.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk guna mendukung dan membantu tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko dan pengawasan terkait penggunaan teknologi informasi secara efektif.

Mengacu pada Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah organ pendukung Direksi yang membantu Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG di Perusahaan. Audit Internal merupakan satuan kerja yang independen dengan garis pelaporan kepada Presiden Direktur.

Secara umum, Audit Internal menilai bahwa unit kerja terkait telah mengimplementasikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada proses/aktivitas di masing-masing unit kerja tersebut. Audit Internal telah memberikan rekomendasi atas beberapa kontrol dalam pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

Referring to the Consumer Protection Committee Charter, the Consumer Protection Committee meeting is held at least 2 (two) times a year.

CLAIM COMMITTEE

Claim Committee is a committee formed to seek approval from the Board of Directors on Claim Committee establishment and revision of approval matrix on ex gratia as stipulated in expense policy.

Referring to the Internal Memorandum Claim Committee, the Claim Committee meeting is held at least 4 (four) times a year (quarterly) or at any time as needed. During 2022, Claim Committee held meetings 4 (four) times a year.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Information Technology Steering Committee is a committee formed to support and assist the duties and responsibilities of the Board of Directors in implementing risk management and supervision related to the effective use of information technology.

Referring to the Decree of the Board of Directors regarding Information Technology Steering Committee, the Information Technology Steering Committee meeting is held at least 2 (two) times a year. During 2022, Information Technology Steering Committee held meetings 2 (two) times a year.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit is a supporting organ of the Board of Directors that assists the President Director to oversee the effectiveness of the Company's internal control system and GCG implementation. Internal Audit is an independent working unit reports to the President Director.

In general, Internal Audit considers that the relevant working units have implemented governance, risk management, and internal controls on the processes/activities within each working unit. The Internal Audit has provided recommendations on several controls in the Company's business and operations.



AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPST 2022 dari calon-calon yang diusulkan oleh Komite Audit dan diajukan oleh Dewan Komisaris. Pada 2022, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member firm of PwC Global Network*).

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait hal tersebut dan telah memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT yaitu Kepala Bagian Kepatuhan, dengan garis pelaporan kepada Direktur Kepatuhan.

PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Perusahaan telah melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi *anti-fraud* di aktivitas operasional.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 72 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan

EXTERNAL AUDITOR

The Company's Annual Financial Statement is audited by the Public Accounting Firm which appointed by the AGMS 2022 from candidates proposed by the Audit Committee and recommended by the Board of Commissioners. In 2022, the Company's Public Accounting Firm is Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (*a member firm of PwC Global Network*).

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING AND COUNTER TERRORISM FINANCING PROGRAM (AML AND CTF)

In line with Regulation of the Financial Services Authority No.12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Counter Terrorism Financing in the Financial Services Sector and Regulation of the Financial Services Authority No. 23/POJK.01/2019 on the Amendment of Regulation of the Financial Services Authority No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Counter Terrorism Financing in the Financial Services Sector, the Company already has relevant policy and procedure and already has a special working unit and/or appointed Company's officer who responsible for the implementation of AML and CTF program is the Head of Compliance, with reporting line to Compliance Director.

ANTI FRAUD STRATEGY IMPLEMENTATION

In order to control fraud, the Company has fulfilled the fraud controlling function and implemented anti-fraud strategy in operational activities.

In accordance with Article 72 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 69/POJK.05/2016 on Business Conduct of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 46/SEOJK.05/2017 on Fraud Control, Anti-Fraud Strategy Implementation, and Anti-Fraud Strategy Report for Insurance Companies, Sharia Insurance Companies,



Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, Perusahaan telah mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti-*fraud*, dan laporan strategi anti-*fraud*, dan melakukan pelaporan atas pelaksanaan strategi anti-*fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2022, tidak ada perkara atau tuntutan hukum yang mengakibatkan dampak negatif terhadap Astra Life, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham.

PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dapat dilaporkan kepada atasan atau kepala bagian kepatuhan Perusahaan dan/atau kepala bagian manajemen risiko Perusahaan. Pada tahun 2022, seluruh pelaporan dugaan pelanggaran di Perusahaan telah ditindaklanjuti serta diselesaikan dengan baik oleh Perusahaan.

Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies, or Sharia Unit, the Company has regulated fraud control, anti-fraud strategy implementation, anti-fraud strategy report, and done reporting on anti-fraud strategy implementation to Financial Services Authority align with applicable laws.

MAJOR CASES

During 2022, there are no legal cases that have negative impact on Astra Life, the Board of Commissioners, or Shareholders.

VIOLATION REPORTING

Any suspected violation of Company policies can be reported to the supervisor or the head of the Company's compliance department and/or the head of Company's risk management department. In 2022, all reports of alleged violations in the Company had been followed up and resolved properly by the Company.